

TANGGAL PENYUSUNAN		TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
FAKULTAS	HUKUM		
PROGRAM STUDI	HUKUM		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK		POLITIK HUKUM	
SKS	2	SEMESTER : VII	
STATUS MK			
DOSEN PENGAMPU	Sugeng Rahardja, S.H.,M.Hum Aep Sulaeman, S.H.,Sp.1.		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 2. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 3. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan Bermasyarakat dan bernegara; 4. Menginternalisasi nilai,norma dan etika akademik; 5. Menerapkan dan mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan dan ketaatan. 	
	PENGETAHUAN	Menguasai konsep ilmu pengetahuan hukum sebagai landasan dalam menghadapi masalah hukum bagi praktisi hukum, akademisi maupun penggiat masyarakat.	
	KETRAMPILAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat yang relevan dengan ilmu dan keahliannya; 	

		<p>2. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan kedalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin;</p> <p>3. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri</p>
	KETRAMPILAN KHUSUS	<p>1. Mampu mengaplikasikan konsep dan pola pikir ilmu hukum serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan media/sumber belajar;</p> <p>2. Mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang telah tersedia secara inovatif dan teruji;</p> <p>3. Mampu beradaptasi terhadap situasi terkini yang berkembang terutama dalam bidang ilmu hukum khususnya dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.</p>
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	(P2)	<p>1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>2. Menerapkan dan mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;</p> <p>3. Taat Hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p>
DESKRIPSI MATA KULIAH	Mengkaji politik hukum secara komprehensif meliputi perkembangan politik hukum dalam mencapai perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang dicita-citakan, Tempat politik hukum dalam cabang-cabang ilmu hukum, ruang lingkup politik hukum, politik perundang-undangan (legal policy) politik penegakan hukum (enforcement policy), kebijakan pentaatan, kebijakan sanksi, mengkaji Hubungan Kausal Antara Hukum dan Politik, Strategi Politik Hukum, Aplikasi Politik Hukum, Model Tatanan Politik Hukum, Model Tatanan Hukum Represif.	
METODE PEMBELAJARAN	<p><i>Contextual Teaching and Learning</i></p> <p><i>Small Grup Discussion/ Cooperative Learning</i></p> <p><i>Problem Based Learning</i></p>	
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	Persentasi dan <i>Online Exercise/Kuiz (V-Class)</i>	
REFERENSI	<p>1. Moch. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988</p> <p>2. Bintan R. Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta 1988</p> <p>3. Bomer Pasaribu, Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru dalam Perspektif reformasi politik ketenagakerjaan, Kompas, 18 September 1997</p>	

	4. Diktat Kuliah Politik Hukum
--	--------------------------------



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi: Hukum

Fakultas: Hukum

Mata Kuliah:		Politik Hukum	Kode:		SKS: 2	Sem: V	
Dosen Pengampu:		Sugeng Rahardja, S.H.,M.Hum Aep Sulaeman, S.H.,Sp.1.					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):		(C2) 1. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 2. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis,kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan IPTEK; 3. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas hasil pekerjaannya secara mandiri.					
1	2	3	4	5	6	7	
Minggu ke-	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)
1	Mahasiswa setelah menerima gambaran umum tentang rencana perkuliahan Politik Hukum dapat mengkaji literatur.	Eksoistensi hukum di Indonesia dewasa ini dan tempat Politik Hukum dalam kerangka disiplin hukum	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2 x 50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab.	Ketepatan dalam menerima gambaran umum tentang rencana perkuliahan Politik Hukum dapat memngkaji literatur.	

2	Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis akan istilah dan pengertian Politik Hukum.	Istilah politik hukum dan istilah hukum, istilah dan pengertian Politik Hukum serta Politik Hukum dan sifatnya.	<i>Problem Based Learning</i>	2 x 50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab.	Ketepatan dalam menganalisis akan istilah dan pengertian Politik Hukum.	
3	Mahasiswa menganalisis tentang bagaimanakah korelasi antara hukum dan politik.	Istilah politik hukum dan istilah hukum, istilah dan pengertian Politik Hukum serta Politik Hukum dan sifatnya.	<i>Problem Based Learning</i>	2 x 50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab.	Ketepatan menganalisis tentang bagaimanakah korelasi antara hukum dan politik.	
4	Mahasiswa menganalisis tentang konfigurasi Politik dan Karakter produk hukum.	Hubungan hukum dengan kekuasaan dan hubungan kasualitas hukum dan politik.	<i>Small Grup Disscusion/ Cooperative Learning</i>	2 x 50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab, Tugas kelompok.	Ketepatan menganalisis tentang konfigurasi Politik dan Karakter produk hukum.	
5	Mahasiswa menganalisis tentang konfigurasi Politik dan Karakter produk hukum.	Pengertian Karakter Produk Hukum dan indikatornya.	<i>Problem Based Learning</i>	2 x 50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab.	Ketepatan menganalisis tentang konfigurasi Politik dan Karakter produk hukum.	
6	Mahasiswa menganalisis beberapa pendekatan	Politik Hukum Kolonial.	<i>Small Grup Disscusion/</i>	2 x 50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab dan tugas	Ketepatan menganalisis	

	terhadap sejarah hukum di Indonesia.		<i>Cooperative Learning</i>		kelompok.	beberapa pendekatan terhadap sejarah hukum di Indonesia.	
7	Mahasiswa menganalisis tentang politik hukum Pemerintah Daerah di Indonesia secara umum.	Periodisasi Pemerintah Daerah, Politik Hukum Pemerintahan Daerah jaman Kolonial Belanda,serta politik pemerintah daerah jaman penjajahan /pendudukan Jepang.	<i>Small Grup Disscusion/ Cooperative Learning</i>	2 x 50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab dan tugas kelompok.	Ketepatan menganalisis tentang politik hukum Pemerintah Daerah di Indonesia secara umum.	
8	UTS						
9	Mahasiswa menganalisis tentang politik hukum Pemerintah Daerah di Indonesia secara umum.	Politik Hukum pemerintah daerah setelah Indonesia merdeka.	<i>Problem Based Learning</i>	2 x 50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab.	Ketepatan menganalisis tentang politik hukum Pemerintah Daerah di Indonesia secara umum.	
10	Mahasiswa menganalisis secara umum tentang kepartaian dan sistem	Pijakan teoritis tentang kepartaian dan pemilu.	<i>Problem Based Learning</i>	2 x 50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab.	Ketepatan menganalisis secara umum	

	pemilu yang dianut.					tentang kepartaian dan sistem pemilu yang dianut.	
11	Mahasiswa menganalisis secara umum tentang kepartaian dan sistem pemilu yang dianut.	Sistem Pemilu yang dianut.	<i>Problem Based Learning</i>	2 x 50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab.	Ketepatan menganalisis secara umum tentang kepartaian dan sistem pemilu yang dianut.	
12	Mahasiswa menganalisis tentang politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia.	Landasan hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan beberapa kebijaksanaan hukum ketenagakerjaan	<i>Problem Based Learning</i>	2 x 50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab.	Ketepatan menganalisis tentang politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia.	
13	Mahasiswa menganalisis tentang politik hukum agraria di Indonesia	Politik hukum agraria kolonial, pluralisme, dan kolonialis serta politik hukum agraria nasional, Hukum Agraria setelah Indonesia merdeka.	<i>Small Grup Disscusion/ Cooperative Learning</i>	2 x 50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab dan tugas kelompok.	Ketepatan menganalisis tentang politik hukum agraria di Indonesia.	
14	Mahasiswa menganalisis tentang politik hukum agraria di Indonesia.	Ketepatan menganalisis tentang politik	<i>Small Grup Disscusion/ Cooperative</i>	2 x 50 Menit	Pemaparan materi, dan Tanya jawab dan tugas kelompok.	Ketepatan menganalisis tentang politik	

		hukum agraria di Indonesia.	<i>Learning</i>			hukum agraria di Indonesia	
15	Review						
16	UAS						
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moch. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988 2. Bintan R. Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta 1988 3. Bomer Pasaribu, Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru dalam Perspektif reformasi politik ketenagakerjaan, Kompas, 18 September 1997 4. Diktat Kuliah Politik Hukum 						